

Operasi pasar murah sebagai alternatif mengatasi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat

Dikdik Kusdiana¹, Mochammad Ridwan^{2*}, Sasa Saefulrohman Suratman³

¹Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, email: dikdikkusdiana@unpas.ac.id

²Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, email: mridwan@unpas.ac.id

³Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, email: sasa_ssuratman@unpas.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-10-12

Diterima: 2024-03-22

Diterbitkan: 2024-03-31

Keywords:

ability to pay; low-cost market operation; subsidy

Kata Kunci:

kemampuan membayar; operasi pasar murah; subsidi



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Yulia Pramusinta,
Alfi Nur Rosyidatul Ummah

ABSTRACT

The Low-Cost Market Operation is one of the new food price stabilization programs formed by the government in 2017. The specific impact of COVID-19 caused the poverty rate in the Cimahi City area in 2020 to reach 5.11%, an increase of 0.72% compared to the previous year in 2019. The method used is PAR (Participatory Action Research) consisting of preparation, data collection, and analysis of the implementation of the cheap market operation. The number of poor families in Cimahi City in 2019 reached 25,556 households (HH) spread across 3 districts, namely South Cimahi, which is the area with the most poor families reaching 11,111 HH, North Cimahi reaching 7,767 HH, and Central Cimahi reaching 6,779 HH. Based on the severity of poverty, the number of very poor families (decile 1) in South Cimahi District reached 5,075 HH, Central Cimahi 2,678 HH, and North Cimahi 4,046 HH. The subsidized commodities in the cheap market of Cimahi City include rice, cooking oil, granulated sugar, chicken meat, and chicken eggs. Price fluctuations before Ramadan, Eid al-Fitr, and New Year caused demand to soar, so subsidies are needed to keep prices stable and available to the poor population in Cimahi City. The output generated by the implementation of this activity is the drafting of the concept of the Mayor of Cimahi's Regulation on Subsidies for Nine Basic Commodities for Socially Vulnerable Communities.

ABSTRAK

Pasar Murah merupakan salah satu program stabilisasi harga pangan yang baru dibentuk pemerintah pada tahun 2017. Dampak COVID-19 secara spesifik menyebabkan tingkat kemiskinan di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2020 mencapai 5,11 % atau naik sebesar 0,72% dibandingkan pada tahun sebelumnya 2019. Metode yang digunakan adalah PAR (Participatory Action Research) yang terdiri dari persiapan, pengambilan data, dan analisis penyelenggaraan operasi pasar murah. Jumlah keluarga miskin di Kota Cimahi Tahun 2019 mencapai 25.556 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Cimahi Selatan merupakan wilayah dengan keluarga miskin terbanyak mencapai 11.111 KK, Cimahi Utara mencapai 7.767 KK dan Cimahi Tengah mencapai 6.779 KK. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan, jumlah keluarga sangat miskin (desil 1) di Kecamatan Cimahi Selatan mencapai 5.075 KK, Cimahi tengah 2.678 KK dan Cimahi Utara mencapai 4.046 KK. Komoditas yang disubsidi di pasar murah Kota Cimahi meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam. Fluktuasi harga menjelang Ramadhan, Lebaran, dan tahun baru menyebabkan permintaan melonjak, sehingga subsidi diperlukan agar harga tetap stabil dan tersedia bagi penduduk miskin di Kota Cimahi. Adapun luaran yang dihasilkan dengan pelaksanaan

kegiatan ini adalah tersusunnya konsep Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Subsidi Sembilan Bahan Pokok Bagi Masyarakat Rawan Sosial.

Cara mensitasi artikel:

Kusdiana, D., Ridwan, M., & Suratman, S. S. (2024). Operasi pasar murah sebagai alternatif mengatasi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(2), 305-314. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i2.20726>

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi saat ini secara fundamental mempengaruhi tiga hal yang mendasar. Tiga hal tersebut dikenal dengan istilah triple bottom line yang terdiri dari *planet*, *people*, dan *profit* (Elkington, 2004). Dampak pandemi ini mempengaruhi aktivitas manusia yang dikenal dengan istilah social distancing dan lockdown. Aktivitas manusia mempengaruhi kondisi planet seperti penurunan emisi Co2 yang diprediksi turun sebesar 8% tahun 2020 (CB Bhattacharya, 2020). Namun, dampak yang baik terhadap planet tidak diimbangi dengan 2 hal yang lainnya yaitu *people* dan *profit*. Munculnya pengangguran dan berkurangnya pendapatan yang signifikan untuk berbagai industri (Hakovirta & Denuwara, 2020; Rafael et al., 2020).

Pandemi COVID-19 yang telah dan masih berlangsung di 210 negara telah menimbulkan biaya kesehatan yang meningkat dengan porsi yang besar. Pembatasan pergerakan sosial berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti berkurangnya permintaan, di sisi penawaran terjadi guncangan karena terganggunya produksi karena penurunan mobilitas pekerja dan bahan baku. Pada kegiatan ekonomi lainnya, beberapa investor menunda atau membatalkan kegiatan investasinya. Sebagai hasilnya, ekonomi global diproyeksikan berkontraksi tajam hingga minus 5,2 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, jauh lebih buruk daripada dampak ekonomi selama krisis keuangan 2008-2009 (World Bank, 2020).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di setiap negara sangat bervariasi. Berdasarkan hasil proyeksi World Bank (Juni, 2020), diperkirakan pada tahun 2020 GDP negara-negara maju (*advance economics*) turun sebesar 7%. Sementara di negara-negara yang termasuk dalam kategori *emerging market and developing economies*, penurunan GDP diperkirakan sebesar minus 2,5%. Perekonomian di negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara diprediksi mengalami kontraksi sebesar minus 2,7%. Perbedaan dampak ekonomi ini selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global tentunya ditentukan juga oleh kondisi ekonomi domestik serta kondisi wabah COVID-19 di setiap negara yang berbeda-beda. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah (Hakim et al., 2023). Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang.

Dampak COVID-19 secara spesifik menyebabkan tingkat kemiskinan di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2020 mencapai 5,11 % atau naik sebesar 0,72% dibandingkan pada tahun sebelumnya 2019, atau pada garis kemiskinan sebesar Rp511.375 pada tahun 2020, sebagai mana terlihat pada tabel 1.

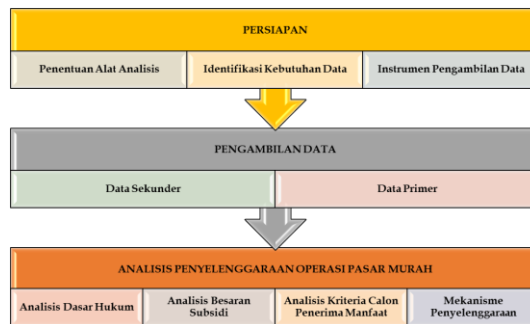
Tabel 1. Garis kemiskinan dan penduduk miskin Kota Cimahi tahun 2011-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (dalam Rp)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2011	293.143	7.15
2012	318.871	6.68
2013	347.234	5.63

2014	361.794	5.47
2015	386.513	5.84
2016	411.665	5.92
2017	433.759	5.76
2018	462.969	4.94
2019	484.804	4.39
2020	511.375	5,11

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020

Pasar murah merupakan salah satu program stabilisasi harga pangan yang baru dibentuk pemerintah pada tahun 2017 dengan menunjuk Perum Bulog sebagai salah satu pelaksana program (Proborini et al., 2018). Kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat dapat dikurangi dengan memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk kebijakan subsidi dengan menyasar kelompok tertentu (Alfath et al., 2022; Li et al., 2023; Purnomo et al., 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, maka bersama Pemerintah Kota Cimahi kami melakukan analisis besaran subsidi dan penentuan kriteria calon penerima manfaat dalam perencanaan operasi pasar murah. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari persiapan, pengambilan data, dan analisis penyelenggaraan operasi pasar murah. Secara ringkas tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.

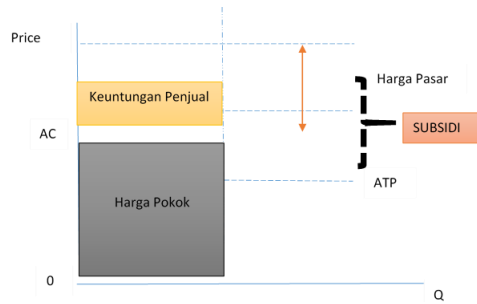


Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat

METODE

Metode PAR (*Participatory Action Research*) yang mana dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan suatu cara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin. Adapun tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1 yang mana bertujuan memberikan suatu hasil berdasarkan hasil identifikasi kondisi masyarakat untuk menghasilkan kebijakan untuk pemerintah daerah.

Metode pelaksanaan dilakukan dengan analisis deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan terkait subsidi dan operasi pasar murah, baik peraturan di tingkat nasional dan daerah/kota untuk dijadikan landasan hukum pelaksanaan operasi Pasar Murah Sembako di Kota Cimahi (Agustino et al., 2021; Yuda & Qomariyah, 2022). Subsidi merupakan besaran transfer pemerintah kepada produsen, agar harga jual dapat dijangkau oleh konsumen (rumah tangga miskin) (Barbier & Burgess, 2020; Hartono et al., 2021).



Gambar 2. Penentuan subsidi

Ability to Pay (ATP) Rumah tangga Miskin terhadap kebutuhan pokok adalah kemampu Rumah tangga miskin untuk membayar sejumlah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkannya dengan pendapatan yang dia miliki (Higashi et al., 2022; Tjiptono et al., 2022). Untuk menghitung ATP digunakan rumus:

$$ATP_i = (P_p \cdot I_t \cdot P_t) / T_t$$

Keterangan:

- ATP_i : Kemampuan membayar (ability to pay) untuk komoditas tertentu
- I_t : Pendapatan Rumah tangga Miskin per bulan
- P_p : Persentase Pendapatan untuk membeli barang kebutuhan pokok (sembako)
- P_t : Persentase pengeluaran untuk komoditas i dari persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli sembako
- T_t : Total Jumlah komoditas i yang dikonsumsi setiap bulannya

Sehingga besaran subsidi untuk setiap unit komoditas yang dibeli keluarga miskin menjadi:

$$SUB_i = MP_i - ATP_i$$

Keterangan:

- Sub_i : Besaran subsidi per unit untuk komoditas i (sembako)
- MP_i : Harga Pasar per unit komoditas i
- ATP_i : Kemampuan membayar untuk setiap unit komoditas i.

Sehingga total subsidi untuk setiap komoditas yang harus ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

$$TSUB_i = \sum_1^n SUB_i * Q_i$$

Keterangan:

- TSUB_i : Total subsidi untuk komoditas i
- SUB_i : Subsidi persatuan komoditas i
- Q_i : Jumlah satuan komoditas i yang dibutuhkan masyarakat miskin.

Maka total pengeluaran pemerintah untuk subsidi adalah:

$$TSUB = \sum_1^n TSUB_i$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu: Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Indeks kedalaman dan keparahan tingkat kemiskinan di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2020 mencapai 0,75% dan dengan tingkat indeks keparahannya mencapai 0,18%. Terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 tingkat kedalamannya hanya sebesar 0,6% dengan tingkat keparahan sebesar 0,14%.

Tabel 1. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Cimahi 2011-2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (%)
2011	0.91	0.19
2012	1.14	0.32
2013	1.09	0.29
2014	0.89	0.21
2015	0.91	0.21
2016	0.71	0.14
2017	1.1	0.35
2018	0.84	0.23
2019	0.6	0.14
2020	0,75	0,18

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020

Pola konsumsi masyarakat Kota Cimahi pada tahun 2020 pengeluaran rata-rata perkapita sebulan yaitu sebesar Rp.786.372,- Berdasarkan kelompok makanan menunjukkan sebagian besar berada pada kelompok makanan minuman jadi yaitu rata-rata perkapita sebulan sebesar Rp. 317.302,- kemudian rokok dan tembakau sebesar Rp.91.769,- dan padi padian sebesar Rp.61.320,- sebagaimana terlihat dalam tabel 3.

Tabel 2. Pengeluaran rata-rata perkapita an menurut kelompok makanan Kota Cimahi Tahun 2020

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan (Rupiah)
Padi-Padian	61.320
Umbi-Umbian	6.510
Ikan	36.562
Daging	48.296
Telur Dan Susu	53.008
Sayur-Sayuran	45.972
Kacang-Kacangan	16.176
Buah-Buahan	40.506
Minyak Dan Lemak	13.793
Bahan Minuman	25.074
Bumbu-Bumbuan	15.411
Konsumsi Lainnya	14.944
Makanan Minuman Jadi	317.302
Rokok Dan Tembakau	91.769
Kota Cimahi	786.372

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020

Jumlah keluarga miskin di Kota Cimahi Tahun 2019 mencapai 25.556 Kepala Keluarga yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan merupakan wilayah dengan keluarga miskin terbanyak yaitu mencapai 11.111 kepala keluarga (KK),

sementara di Kecamatan Cimahi Utara terdapat 7.767 KK dan di Cimahi Tengah mencapai 6.779 KK. Berdasarkan Tingkat Keparahan kemiskinan, jumlah keluarga sangat miskin (desil 1) di Kecamatan Cimahi Selatan mencapai 5.075 KK, di Cimahi tengah 2.678 KK dan Cimahi Utara sebanyak 4.046 KK.

Tabel 3. Jumlah keluarga miskin di tiap kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019

No	Kecamatan	Kode	Jumlah Rumah Tangga				Jumlah
			Desil 1	Desil 2	Desil3	Desil 4	
1	CIMAHI SELATAN	3277010	5,075	3,432	1,182	1,422	11,111
2	CIMAHI TENGAH	3277020	2,678	2,157	876	1,068	6,779
3	CIMAHI UTARA	3277030	4,046	2,219	639	772	7,676
Total			11,799	7,808	2,697	3,262	25,566

Sumber : Data Kepmensos Nomor 8/HUK/2019

Ket: Desil 1 = Sangat Miskin, Desil 2 = Miskin, Desil 3 = Hampir Miskin, Desil 4 = Rentan Miskin.

Komoditas yang akan diberikan subsidi pada pasar murah Kota Cimahi meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam. Pertimbangan komoditas tersebut yang dijadikan prioritas untuk disubsidi karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang kerap jadi kebutuhan prioritas untuk dikonsumsi penduduk miskin. Kemudian harga komoditas tersebut sering kali sangat berfluktuasi biasanya menjelang Ramadhan, menjelang lebaran dan menjelang tahun baru yang mana permintaan terhadap komoditas tersebut sering kali melonjak, sehingga harga tidak stabil yang membutuhkan bantuan pemerintah berupa subsidi agar komoditas tersebut tetap dapat dikonsumsi oleh penduduk miskin di Kota Cimahi.

Tabel 4. Harga komoditas kebutuhan pokok yang akan disubsidi

No.	Komoditas	Harga Pasar (Rp)
1	Beras	10.500
2	Minyak Goreng	14.000
3	Gula Pasir	13.167
4	Daging Ayam	35.000
5	Telur Ayam	23.667

Sumber : <https://uptpasar.cimahikota.go.id> 2021

Ability to pay (ATP) merupakan kemampuan membayar masyarakat miskin untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok sesuai dengan kebutuhan konsumsinya (Stylianou, 2021). Berdasarkan rumus, ATP dihitung dengan cara membagi porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok dari pendapatan yang diperolehnya setiap bulan dibagi dengan total kuantitas kebutuhan pokok yang dibeli setiap bulannya.

Tabel 5. Hasil perhitungan Ability to pay (ATP) komoditas makanan pokok di Kota Cimahi

No.	Komoditas	It	Pp*Pt	Tt	ATP (Rp)
1	Beras	2002240.52	12.12%	30	8.089,05
2	Minyak Goreng	2002240.52	2.01%	4	10.061,26
3	Gula Pasir	2002240.52	2%	4	10.011,20
4	Daging Ayam	2002240.52	1.45%	1	29.032,49
5	Telur Ayam	2002240.52	1.55%	2	15.517,36

Sumber: Data hasil olahan, 2021.

Masyarakat sasaran subsidi komoditas pasar murah adalah penduduk miskin sehingga besaran subsidi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat miskin

untuk membayar (ATP) komoditas bahan pokok yang dibelinya. Besaran subsidi dihitung dari harga pasar komoditas yang terjadi pada saat itu dikurangi dengan kemampuan membayar (ATP) masyarakat miskin.

Tabel 6. Perhitungan besaran subsidi

No.	Komoditas	ATP (Rp)	Harga pasar (Rp)	Subsidi (Rp)	Dibulatkan (Rp)
1	Beras	8.089,05	10.500	2.410,95	2.500
2	Minyak Goreng	10.061,26	14.000	3.938,74	4.000
3	Gula Pasir	10.011,20	13.167	3.155,79	3.200
4	Daging Ayam	29.032,49	35.000	5.967,51	6.000
5	Telur Ayam	15.517,36	23.667	8.149,64	8.200

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021.

Adapun bentuk paket sembako untuk masyarakat kurang mampu terdiri dari 2 kg beras, 1-liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir maka besarnya subsidi untuk setiap paket sembako adalah Rp12.200.

Tabel 7. Kebutuhan subsidi untuk paket sembako

No.	Komoditas	Satuan	Harg Subsidi (Rp)
1	Beras	2 Kg	5.000
2	Minyak Goreng Kemasan	1 Liter	4.000
3	Gula Pasir	1 kg	3.200
TOTAL			12.200

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021.

Dengan besaran subsidi untuk setiap paket sembako yang akan disalurkan untuk masyarakat tidak mampu maka berdasarkan sebaran masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran bantuan yang terdistribusi di setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 8. distribusi dan total subsidi kebutuhan pokok Kota Cimahi untuk masyarakat kurang mampu

No	Kelurahan	Jumlah Data	Subsidi (Rp)	Total Subsidi
Cimahi Selatan				
1	Melong	3.544	12.200	43.236.800
2	Cibeureum	3.763	12.200	45.908.600
3	Utama	1.890	12.200	23.058.000
4	Leuwigajah	2.666	12.200	32.525.200
5	Cibeber	1.954	12.200	23.838.800
TOTAL		13.817	12.200	168.567.400
Cimahi Tengah				
6	Baros	1.039	12.200	12.675.800
7	Cigugur Tengah	2.827	12.200	34.489.400
8	Karang Mekar	841	12.200	10.260.200
9	Setiamanah	1.388	12.200	16.933.600
10	Padasuka	2.200	12.200	26.840.000
11	Cimahi	937	12.200	11.431.400
TOTAL		9.232	12.200	112.630.400
Cimahi Utara				
12	Pasirkaliki	779	12.200	9.503.800
13	Cibabat	2.926	12.200	35.697.200
14	Citeureup	2.283	12.200	27.852.600
15	Cipageran	3.097	12.200	37.783.400
TOTAL		9.085	12.200	110.837.000
GRAND TOTAL		32.134	12.200	392.034.800

Sumber: Data hasil olahan, 2021.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan pendampingan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Dihasilkan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan subsidi untuk kebutuhan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu. Penerima subsidi yang diperoleh dari dinas terkait menyiapkan dan mendistribusikan kupon kepada penerima bantuan subsidi kebutuhan pokok. Setiap penerima bantuan subsidi kebutuhan pokok hanya berhak mendapatkan satu kupon untuk membeli paket kebutuhan pokok per rumah tangga.

Penerima bantuan subsidi kebutuhan pokok dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga eceran lokal setelah dikurangi besaran subsidi. Kebutuhan pokok yang tersedia di lokasi bazar akan dibiayai melalui subsidi sesuai dengan jumlah subsidi yang telah ditetapkan. Setiap pengunjung bazar diizinkan untuk membeli kebutuhan pokok bersubsidi dengan batasan berikut: maksimal 5-kilogram beras, 2-liter minyak goreng, 2-kilogram gula, 1-kilogram daging, 2-kilogram ayam, dan 1-kilogram telur. Para pelaku usaha/pedagang menjalankan penjualan kebutuhan pokok bersubsidi dengan menjual kepada pengunjung bazar dengan harga eceran lokal setelah dikurangi besaran subsidi.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan perencanaan operasi pasar murah untuk Pemerintah Kota Cimahi merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Kota Cimahi dalam merespons kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pendampingan ini menghasilkan analisis besaran subsidi dan penentuan kriteria calon penerima manfaat. Untuk tahap selanjutnya diperlukan penyusunan aspek kelembagaan penyelenggara operasi pasar murah, penetapan pemasok komoditas, penetapan waktu dan tempat penyelenggaraan, dan peraturan wali kota yang mengatur mengenai subsidi untuk masyarakat yang berhak menerima. Adapun luaran yang dihasilkan dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya konsep Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Subsidi Sembilan Bahan Pokok Bagi Masyarakat Rawan Sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L., Sylviana, M., & Budiati, A. (2021). Government Capacity in Coping with Covid-19 in Bandung City. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 275–290. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.847>
- Alfath, T. P., Djatmiati, T. S., Bagus, Moh., & Ardhiyoko, A. (2022). The Government Responsibilities in Handling the Covid-19 Pandemic and Improving The Declining Economy in Indonesia. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(2), 285–295. <https://doi.org/10.29138/ijeed.v5i2.1754>
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2020). Sustainability and development after COVID-19. *World Development*, 135, 105082. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105082>
- CB Bhattacharya, H. J. (2020). *How the COVID-19 reset can help firms build a better world | World Economic Forum*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/the-covid-19-reset-sustainability/>
- Elkington, J. (2004). *Enter the Triple Bottom Line*. Earthscan.
- Hakim, M. Z., Rismayanti, A., & Moenta, P. (2023). Discretion by The Indonesian Government in The Covid-19 Pandemic Era. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.996>
- Hakovirta, M., & Denuwara, N. (2020). How COVID-19 redefines the concept of sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9), 10–13. <https://doi.org/10.3390/su12093727>
- Hartono, A., Ishak, A., Abdurrahman, A., Astuti, B., Marsasi, E. G., Ridanasti, E., Roostika, R., & Muhammad, S. (2021). COVID-19 Pandemic and Adaptive Shopping Patterns: An Insight from Indonesian Consumers. *Global Business Review*, 097215092110135. <https://doi.org/10.1177/09721509211013512>
- Higashi, R. T., Sood, A., Conrado, A. B., Shahan, K. L., Leonard, T., & Pruitt, S. L. (2022). Experiences of increased food insecurity, economic and psychological distress during the COVID-19 pandemic among Supplemental Nutrition Assistance Program-enrolled food pantry clients. *Public Health Nutrition*, 25(4), 1027–1037. <https://doi.org/10.1017/S1368980021004717>
- Li, N., Chen, M., Gao, H., Huang, D., & Yang, X. (2023). Impact of lockdown and government subsidies on rural households at early COVID-19 pandemic in China. *China Agricultural Economic Review*, 15(1), 109–133. <https://doi.org/10.1108/CAER-12-2021-0239>
- Proborini, A., Ekowati, T., & Sumarjono, D. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di DKI Jakarta. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4(1), 38–49. <https://doi.org/10.20961/bise.v4i1.21298>
- Purnomo, A. R. E., Suharto, D. G., & Wahyunengseh, R. D. (2020). The Role of Discretion in Handling COVID-19. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3136>

- Rafael, R. D. M. R., Neto, M., Carvalho, M. M. B. de, David, H. M. S. L., Acioli, S., & Faria, M. G. de A. (2020). Epidemiologia, políticas públicas e pandemia de Covid-19: o que esperar no Brasil? [Epidemiology, public policies and Covid-19 pandemics in Brazil: what can we expect?] [Epidemiologia, políticas públicas y la pandemia de Covid-19 en Brasil: que podemos esperar?]. *Revista Enfermagem UERJ*, 28, e49570. <https://doi.org/10.12957/reuerj.2020.49570>
- Stylianou, V. (2021). A policy response to COVID-19: An Australian perspective. *Journal of the International Council for Small Business*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.1080/26437015.2020.1852060>
- Tjiptono, F., Khan, G., Ewe, S. Y., & Dharmesti, M. (2022). Consumer Behavior During and Post-COVID-19 in Indonesia and Malaysia. In *COVID-19 and the Evolving Business Environment in Asia* (pp. 205–233). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2749-2_11
- World Bank. (2020). *Global Economic Prospects June 2020* (Issue June). <https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5>
- Yuda, T. K., & Qomariyah, N. (2022). Ideas and Policy Response to the COVID-19 Crisis: Evidence from Jakarta, Indonesia. *Social Policy and Society*, 1–20. <https://doi.org/10.1017/S1474746422000616>